

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaku korupsi merupakan setiap orang yang melakukan usaha untuk memperoleh berbagai keuntungan dengan mengorbankan hak orang lain. Masyarakat sering menggambarkan pelaku korupsi dengan sosok yang berdasi, berpakaian rapi, menggunakan jas, atau sesuai dengan setelan pakaian para pejabat, baik pejabat pemerintah maupun para pengusaha. Hal itu terjadi karena pelaku korupsi yang ditampilkan oleh media massa, banyak melibatkan pejabat pemerintah. Salah satunya adalah keterkaitan mantan Presiden Republik Indonesia Boediono dalam praktik perbankan yang tidak sehat, agar Bank Century mendapat tambahan dana. Pejabat pemerintah atau pengusaha yang memiliki perut gendut juga sering dikaitkan dengan pelaku korupsi. Perut yang gendut diasumsikan sebagai gambaran hidup mereka yang telah sukses, dalam hal ini melalui praktik korupsi.

Selain itu, masyarakat sering terpaku pada sosok laki-laki dewasa dalam menuangkan kritiknya terhadap pelaku korupsi. Jika kita melihat media massa baik itu media cetak atau internet, sering kita jumpai gambar-gambar karikatur berupa sosok Pak Lurah, Pak Camat, dan Polisi Lalu Lintas laki-laki sebagai

pelaku korupsi. Masyarakat hampir tidak pernah menggunakan sosok wanita (Bu Lurah ataupun Polisi Wanita) dalam menggambarkan pelaku korupsi.

Jika kita simpulkan, penggambaran pelaku korupsi di masyarakat adalah sosok yang berpakaian rapi, pejabat pemerintah atau pengusaha, memiliki perut gendut dan berjenis kelamin laki-laki serta dewasa. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, yaitu perseorangan atau korporasi<sup>1</sup>. Melihat pernyataan tersebut, tentunya pelaku korupsi tidak dapat dibatasi oleh penampilan atau profesi, termasuk jenis kelamin tertentu. Mantan Putri Indonesia tahun 2001 Angelina Sondakh yang terlibat kasus suap wisma atlet SEA Games tahun 2012 merupakan salah satu contoh praktik korupsi yang melibatkan perempuan sebagai pelakunya, dan memiliki bentuk tubuh yang ideal, bukan perut yang besar.

*“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”* (Pasal 3 UU No.30 Tahun 2002). Sebagai lembaga yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi, KPK menyadari bahwa Undang-Undang saja tidak cukup untuk membuat jera para pelakunya. Selain itu penggambaran masyarakat terhadap pelaku korupsi juga masih sangat sempit. Oleh karena itu, KPK bekerja sama dengan TII (*Transparency International Indonesia*) dan USAID (*United State Agency International Development*) memilih membuat suatu metode pendidikan anti korupsi dengan konten yang lebih tepat serta menarik. Film dipilih oleh KPK

---

<sup>1</sup> UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

untuk memberikan pemahaman tentang fenomena korupsi yang ada disekitar kita dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pelaku korupsi, khususnya yang ada di Indonesia melalui film *Kita Versus Korupsi*.

Film dengan kemampuan daya visualnya yang didukung audio yang khas, sangat efektif sebagai media hiburan dan juga sebagai media pendidikan dan penyuluhan (Cangara, 2009:137). Konstruksi film dalam wujud audio visual dapat lebih tegas, jelas, dan beragam baik secara jenis kelamin maupun profesi dalam menunjukkan penggambaran pelaku korupsi. Selain itu, film *Kita Versus Korupsi* merupakan gabungan dari empat film pendek yang mencoba menguak fenomena korupsi dari berbagai golongan sehingga penggambaran pelaku korupsi tidak terbatas hanya pada pemerintah atau laki-laki saja.

Film pendek yang pertama berjudul "*Rumah Perkara*", dimana pada film tersebut menunjukan seorang pejabat terpilih lebih pro pada pengusaha, serta tidak amanah pada rakyat seperti yang dijanjikan saat kampanye. Tindakan menyogok untuk memperoleh pangkat dan kemudahan tertentu ditampilkan pada film pendek kedua yaitu "*Aku Padamu*". Praktik korupsi pada era orde baru pun turut direpresentasikan pada film pendek ketiga "*Selamat Siang, Risa!*" dimana orang-orang yang memiliki cukup uang pada masa krisis ekonomi memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, bukan untuk menolong atau meringankan orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Kemudian pada film pendek terakhir yaitu "*Psttt...Jangan Bilang Siapa-siapa*" praktik korupsi di lingkungan keluarga dan juga sekolah dimunculkan. Dimana kedua lingkungan tersebut seharusnya mengajarkan kita untuk berperilaku baik, tapi pada kenyataannya sering kali sebaliknya.

Untuk membantu peneliti mengetahui bagaimana representasi pelaku korupsi di Indonesia pada film *Kita Versus Korupsi*, maka peneliti menggunakan metode analisis semiotik Roland Barthes. Metode semiotika dipilih peneliti karena sesuai dengan objek yang ingin diteliti yaitu film. Film terdiri dari jutaan tanda, dan semiotik adalah studi mengenai tanda. Sedangkan model semiotik Roland Barthes dianggap yang paling tepat untuk melihat representasi pelaku korupsi pada film tersebut, karena sistem analisis yang digunakan adalah sistem denotasi dan konotasi. Denotasi merupakan makna yang sebenar-benarnya, yang disepakati bersama secara sosial, yang rujukannya pada realitas. Konotasi merupakan tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan makna atau makna yang implisit, tidak langsung. Berbeda dengan metode yang dikemukakan oleh Saussure yang hanya menekankan analisis pada penanda dan petanda apa yang dihasilkan, dan metode Pierce yang lebih menekankan pada kaitan pemikiran seseorang yang menggunakan tanda dan makna yang dimunculkannya. Oleh karena itu metode analisis semiotik model Roland Barthes ini dapat lebih operasional dan tajam dalam menganalisis representasi pelaku korupsi di Indonesia pada film *Kita Versus Korupsi*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini terumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimana representasi pelaku korupsi di Indonesia pada film *Kita Versus Korupsi* menggunakan metode analisis semiotik Roland Barthes ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi pelaku korupsi di Indonesia pada film *Kita Versus Korupsi* menggunakan metode analisis semiotik Roland Barthes.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

#### 1. Kegunaan teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Komunikasi, khususnya Komunikasi Massa melalui Film.
- 2) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan representasi pelaku korupsi di Indonesia pada film.
- 3) Menjadi referensi bagi penerapan kajian semiotika Roland Barthes dalam film.

#### 2. Kegunaan praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai bagaimana sebuah film dapat merepresentasikan suatu fenomena atau realitas sosial, serta sarana sosialisasi yang dalam hal ini adalah pendidikan anti korupsi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman mengenai representasi pelaku korupsi di Indonesia, sehingga pembaca dapat lebih menanamkan sikap dan perilaku anti korupsi.